

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Program Kerja Organisasi Terhadap Manajemen Program Kerja Organisasi Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah (Studi Di SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)

Aming Kurniawan

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasari fenomena permasalahan belum efektifnya program kerja sekolah yang diduga disebabkan belum optimalnya manajemen dan pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil deskripsi penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen program kerja organisasi dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja sekolah sebesar 83,17%, sedangkan sisanya sebesar 15,83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Adapun hasil pengujian sub hipotesis menunjukkan seluruh variabel berpengaruh secara positif dan signifikan. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pencapaian program kerja sekolah dapat dipengaruhi oleh sejauhmana manajemen dan kebijakan program kerja dijalankan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Manajemen, Efektivitas, Program Kerja Sekolah.

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah komponen terpenting didalam kehidupan bernegara serta turut menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2005, pengertian pendidikan ialah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan agar mutu pendidikan harus diperhatikan serta dioptimalkan, guna mewujudkan manusia Indonesia yang unggul dan bisa bersaing terhadap negara asing terutama masa era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu seluruh unsur penyelenggara pendidikan harus mengutamakan kualitas pendidikan.

Kualitas aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mengelola serta menyelenggarakan proses pendidikan itu sendiri. Terkait hal ini pemerintah telah menetapkan standar pengelolaan pendidikan dalam berbagai peraturan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang memuat aturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional. Disamping itu pemerintah juga bertanggung jawab merumuskan kebijakan nasional yang menyangkut pengelolaan pendidikan. Tugas lainnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pendidikan seperti perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, evaluasi, pengawasan, pengendalian yang dilaksanakan oleh satuan, jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional baik itu dilakukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian tugas-tugas tersebut dilanjutkan oleh satuan atau program pendidikan yang ada pada masing-masing daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam penjaminan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, efektif, dan efisien, maka kebijakan tersebut dibuat kedalam RKT (rencana kerja tahunan), RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahunan) dan aturan aturan atau program –program pendidikan. Secara lebih eksplisit, Standar Pengelolaan Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 di mana disebutkan bahwa sekolah harus membuat perencanaan dan program kedalam bentuk Rencana Kerja Sekolah (RKS). Adapun RKS didalamnya ada RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan). Rencana-rencana tersebut kemudian dinyatakan ke dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Pengertian dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) itu sendiri adalah dokumen yang isinya mengenai rencana kerja di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan, dengan pertimbangan telah memiliki sumber daya untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. RKJM ini merupakan perencanaan untuk kurun waktu empat tahun ke depan. Sementara Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang isinya mengenai rencana program pengembangan sekolah. RKT ini merupakan perencanaan untuk kurun waktu satu tahun ke depan yang tersusun atas dasar RKJM. Atau dengan kata lain RKJM adalah gambaran-gambaran secara umum tentang rencana pengembangan di sekolah dalam kurun waktu empat tahunan serta pelaksanaannya diperinci per satu tahun di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu yang tertentu pula. Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sah atau suatu rencana peruntukkan. Aspek teknik atau manajemen (dalam suatu organisasi) merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. pelaksanaan kebijakan bertalian erat dengan aspek manajemen dalam upayanya mencapai tujuan. Manajemen merupakan sarana agar tercapai maksud dan tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam hal ini adalah mengenai kebijakan program kerja organisasi sekolah menjadi faktor pendorong terbentuknya manajemen program kerja organisasi sekolah karena kebijakan organisasi memuat seperangkat peraturan dan pedoman/standar yang dapat dijadikan landasan bagi sekolah untuk melakukan tata kelola/manajemen sekolah, sehingga akan mendorong tata kelola yang baik dan pencapaian efektivitas program organisasi tersebut. Disamping itu, kenyataan menunjukkan bahwa pemanfaatan kualitas SDM pada sekolah ini masih relatif belum optimal, hal ini terlihat dari penempatan pegawai (tenaga kependidikan) yang tidak linier dengan asal pendidikannya. Dan juga, masih terdapat 13 guru tidak linier dari jenjang pendidikan yang di raihinya dengan mata pelajaran yang di ajarkan. Keterbatasan sumber daya materiil/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi. *Keempat*, pengetahuan dan kemampuan pelaksana belum menunjang pelaksanaan kebijakan secara maksimal, aspek ini berkaitan dengan sikap pelaksana/disposisi. *Kelima*, permasalahan berkaitan dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu pertanggungjawaban/pola fragmentasi masing-masing unit dinilai belum memuaskan.

Permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain terlihat dari gejala-gejala berikut: *Pertama*, kebijakan program kerja belum dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh warga sekolah. *Kedua*, permasalahan sumber daya manusia. SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut sebagai salah satu instansi dibawah naungan Yayasan Al-Marjan

Kersamanah dan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memiliki pegawai (tenaga kependidikan) Staf Administrasi atau Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) sebanyak 11 orang, dan Pengajar (tenaga pendidik) 30 orang yang berasal dari latar belakang pendidikan berbeda, mulai dari Pegawai (tenaga kependidikan) Lulusan SLTP hingga S1 dan pengajar (tenaga pendidik) yang semuanya berlatar belakang S1 sesuai mata pelajaran yang diampu.

Berdasarkan fenomena di lapangan serta didukung keterkaitan konsep secara teoritis, terdapat dugaan adanya hubungan *causal effectual* (sebab akibat) yakni belum efektifnya pencapaian program kerja sekolah diduga dipengaruhi manajemen program kerja yang disebabkan pelaksanaan kebijakan program kerja belum terlaksana secara optimal. Dari pernyataan tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian dengan judul: **“Pengaruh pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi terhadap manajemen program kerja organisasi dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja sekolah (Studi di SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)”**.

2. Metodologi

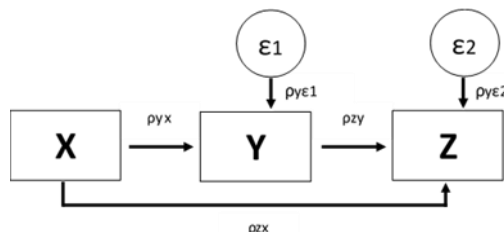
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik survey. Metode ini diharapkan dapat memberikan jawaban bagi pemecahan masalah melalui pengumpulan informasi data lapangan yang menggambarkan factor-faktor yang berhubungan Antara fenomena yang diteliti. Menurut Iskandar (2019: 174), metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan suatu fenomena masalah untuk diteliti pada masa ini dengan tujuan menemukan jawaban akan pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif. Adapun teknik survey, dijelaskan Iskandar (2019: 174), sebagai penelitian dengan penggunaan sampel dari suatu populasi dan diukur melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dengan maksud mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah angket berupa kuesioner terstruktur yang bersifat tertutup di mana responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda sesuai petunjuk. Sedangkan skoring satuan pengukuran yang digunakan, dimana pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban yang disediakan dalam setiap pertanyaan penelitian. Tingkat pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan ordinal dan dengan kategori jawaban terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu (sangat baik/baik/cukup/tidak baik/sangat tidak baik). Unit analisis penelitian ini adalah individu dengan sasaran populasi (*population target*) yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah Garut sejumlah 41 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil, maka peneliti melakukan teknik pengambilan sensus/jenuh. Menurut Sugiyono (2015: 96), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis*).

3. Pembahasan

3.1 Uji Analisis Jalur Path

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh dari Pelaksanaan Kebijakan Program Kerja Organisasi Terhadap Manajemen Program Kerja Organisasi Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah”. Untuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan uji melalui analisis jalur (path analysis) yang disusun dalam diagram jalur berikut ini:



Gambar 1. Diagram Path

Besarnya pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Nilai R- Square

	R- Square
Manajemen Program Kerja Organisasi (Y)	0,2142
Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah (Z)	0,1263

Sumber : Hasil Penelitian (2020)

Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi R-Square yang terdapat dua konstruk laten dalam tabel tersebut yang memiliki nilai estimasi R-square diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai R-Square pada konstruk endogen Manajemen Program Kerja Organisasi (Y) adalah sebesar 0,214. Hal ini menunjukkan bahwa nilai estimasi tersebut adalah sebesar 21,42% sedangkan sisanya sebesar 78,58% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.
2. Nilai R-Square pada konstruk endogen Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah (Z) adalah sebesar 0,1263. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung adalah sebesar 12,63%, sedangkan sisanya sebesar 87,37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Temuan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi dinilai baik, hal ini terlihat dari sejumlah item pernyataan yang dinilai positif. Beberapa aspek yang positif tersebut antara lain konsistensi komunikasi kebijakan, kejelasan isi sosialisasi, dukungan dan komitmen pelaksana, kejelasan instruksi (pada konteks komunikasi) serta kejelasan informasi (pada konteks sumber daya informasi), wewenang berupa tugas pokok dan fungsi yang jelas, dan lain sebagainya. Akan tetapi meskipun pelaksanaan kebijakan program kerja dinilai baik tetapi

belum optimal dikarenakan adanya sejumlah kekurangan, antara lain sosialisasi belum efektif dan intensif akibat keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya materiil dan anggaran, pengetahuan pelaksana yang belum merata, serta pembagian kerja yang kurang proporsional akibat keterbatasan sumber daya.

Temuan ini didukung hasil wawancara kepada pengurus Yayasan Al-Marjan Kersamanah yang menaungi SMK Bakti Kusumah, sejauh ini pelaksanaan kebijakan program kerja SMK Bakti Kusumah relatif berjalan dengan baik, hanya saja terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Sejumlah kendala utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan program kerja antara lain faktor internal seperti sementara faktor eksternal kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Adapun faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan program kerja juga bersifat eksternal dan internal. Faktor internal antara lain motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari seluruh tenaga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sementara faktor eksternal adalah suasana kekeluargaan dalam bekerja.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, faktor SDM di SMK Bakti Kusumah memiliki kontribusi yang besar, baik itu sebagai faktor pendukung maupun sebagai penghambat. Pengaruh SDM atau pelaksana kebijakan sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, baik itu ditinjau dari aspek sumber daya maupun disposisi. Seperti dikemukakan Anggara (2014: 257), “sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik”. Demikian pula dikemukakan Grindle (dalam Anggara, 2014: 256) bahwa “ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi”. Dengan demikian agar optimalisasi pelaksanaan kebijakan program kerja di SMK Bakti Kusumah dapat meningkat, diperlukan perhatian pada aspek SDM pelaksana kebijakan. Selanjutnya, penekanan lainnya adalah pada intensitas komunikasi kebijakan serta ketersediaan sumber daya lainnya. Menurut Grindle (dalam Anggara, 2014: 256), “tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan lain-lain”.

Penetapan mengenai kapan dan bagaimana suatu program kerja akan dijalankan merupakan salah satu upaya guna mengkomunikasikan kebijakan secara jelas. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012: 180), “faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi adalah kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana menjadi kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan”.

Berdasarkan teori di atas, apabila suatu instruksi kebijakan ditetapkan secara jelas kapan dan bagaimana akan dilaksanakan, maka pelaksana cenderung lebih mudah dan terarah untuk melaksanakan instruksi tersebut. “Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal” (Edward III dalam Winarno, 2012: 180).

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012: 193), informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk terlebih dahulu untuk melaksanakan kebijakan. Seperti dijelaskan sebelumnya dalam komunikasi, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan akan menghambat

keberhasilan implementasi. Lebih lanjut menurut Edward III (dalam Winarno, 2012: 194), “bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak” (Edward III dalam Winarno, 2012: 194).

Merujuk kepada pendapat menurut Andang (2014: 35), peneliti mengukur variabel manajemen program kerja organisasi (Y) melalui **4 (empat) dimensi**, yakni: **1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengarahan, 4) pengendalian**. Untuk mengetahui kondisi variabel (Y) maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari **22 (dua puluh dua)** pernyataan yang masing-masing disertai 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Sejumlah aspek yang dinilai positif pada variabel ini adalah penetapan strategi untuk mencapai program kerja, penentuan langkah teknis, penentuan jadwal, identifikasi kegiatan, adanya indikator keberhasilan yang digunakan sebagai standar/acuan, pemberian arahan dan motivasi dari pimpinan, pembentukan tim khusus, serta perbandingan pencapaian dengan standar. Sementara temuan permasalahan pada variabel manajemen program kerja organisasi antara lain belum diterapkannya analisis SWOT, pembagian beban kerja belum proporsional, proses pengembangan guru dan staf yang belum optimal, monitoring yang belum berjalan efektif, serta proses pengendalian berupa upaya-upaya perbaikan belum dijalankan secara optimal.

Permasalahan-permasalahan di dalam manajemen tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program kerja sekolah. Keith dan Girling (dalam Rohiat, 2018: 15), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “kontribusi manajemen pendidikan terhadap keberhasilan dan kegagalan belajar siswa adalah sebesar 32%”. Merujuk pendapat tersebut, jelas bahwa manajemen program kerja organisasi harus diterapkan secara optimal agar menunjang keberhasilan belajar siswa sebagai tujuan utama dari program kerja sekolah.

Merujuk kepada pendapat menurut Raviyanto (dalam Iskandar, 2019: 333), kriteria suatu kegiatan/program dapat dikatakan mencapai efektivitas apabila suatu pekerjaan diselesaikan sesuai perencanaan baik dalam hal waktu maupun mutu. Dengan demikian maka efektivitas program kerja sekolah dapat diukur melalui **2 (dua) dimensi**: 1) Pekerjaan sesuai dengan waktu, 2) Pekerjaan sesuai dengan mutu yang diharapkan.

Sementara temuan permasalahan pada variabel ini adalah masih adanya keterlambatan pada saat pengumpulan bahan rencana kerja, penyusunan rencana kerja, serta finalisasi/pengesahan perumusan program kerja atau dengan kata lain kegiatan-kegiatan tersebut belum terlaksana secara tepat waktu. Selain itu permasalahan lainnya adalah belum tercapainya program kerja sekolah yang sesuai dengan waktu yang direncanakan; belum optimalnya koordinasi antar stakeholder sekolah dalam pelaksanaan program kerja sekolah; belum optimalnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan Pembina pendidikan, dan antar waktu; belum tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; belum tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien serta belum tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencapaian program kerja berjalan baik tetapi belum optimal dikarenakan adanya aspek-aspek yang belum tercapai sepenuhnya baik dari segi waktu maupun mutu kerja. Temuan tersebut diperkuat hasil wawancara kepada komite, bahwa beberapa kendala dalam proses penyusunan maupun finalisasi program kerja adalah program kerja yang dibuat tidak selalu tepat waktu karena keterbatasan sarana dan prasarana serta

SDM yang kurang memadai. Hal ini disebabkan SDM yang terlibat dalam tim penyusunan RKS memiliki peran dan fungsi lain yakni sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga kegiatan perumusan maupun finalisasi program kerja tidak bisa optimal karena mengandalkan sisa tenaga dan pikiran. Meskipun tim yang dipilih dinilai memiliki kompetensi, akan tetapi pelaksanaan tidak bisa sepenuhnya optimal apabila masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab lain.

“Efektivitas sekolah berarti memaksimalkan segenap potensi dan peluang yang ada untuk mencapai hasil yang optimal (Naim dalam Andang, 2014: 71). Selaras dengan makna dasar efektif, sekolah diharapkan menjadi semakin bermutu, berkualitas dan mencerahkan”. Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mewujudkan efektivitas di lingkungan sekolah maka perlu pemaksimalan segenap potensi dan peluang agar tercapai hasil yang optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis utama: Hipotesis nihil (H_0) ditolak dan Hipotesis Kerja (H_1) diterima. Temuan-temuan permasalahan penting dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel manajemen program kerja organisasi dan variabel efektivitas pencapaian program kerja sekolah. *Kedua*, Pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen program kerja organisasi. *Ketiga*, Manajemen program kerja organisasi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas pencapaian program kerja sekolah. *Keempat*, Pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas pencapaian program kerja sekolah.
- b. Hasil penelitian berimplikasi terhadap teori, yakni semakin kuatnya hubungan konseptual dari teori yang melandasi variabel penelitian. Keeratan hubungan antara konsep pelaksanaan kebijakan, manajemen dan efektivitas pencapaian program dibuktikan bahwa satu sama lain saling berkaitan dan memiliki korelasi yang signifikan.
- c. Selain implikasi pada teori, hasil penelitian juga berimplikasi kepada pengelolaan SMK Bakti Kusuma bahwa agar efektivitas pencapaian program kerja sekolah dapat terwujud secara maksimal, maka perlu diperhatikan faktor pelaksanaan kebijakan dan manajemen program kerja organisasi.

Daftar Pustaka

I. Buku-Buku

- Andang, 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik, Cetakan ke 1*, Pustaka Setia, Bandung.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia, Bandung.
- Daryanto. 2013. *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwijowijoto, R.N., 2010. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Computindo, Jakarta.

- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: proses, Analisis dan Partisipasi*, Ghalia, Bogor.
- Iskandar, Jusman, 2019. *Bunga Rampai Administrasi Negara*, Puspaga, Bandung.
- Islamy, M. Irfan, 2010. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Kadarmanto, A.M., Jusuf Udaya. 2010. *Pengantar Ilmu Manajemen*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Majir, Abdul. 2012. *Perkembangan Manajemen Pendidikan*, Cipta Restu, Jakarta.
- Muasaroh, Latifatul. 2010. *Aspek – Aspek Efektivitas*. Literatur Buku, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2015. *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Mulyasa, 2012. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Munadi dan Barnawi, 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Riduwan. 2010. *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta, Bandung.
- Robbin dan Judge, 2010. *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah*, Refika Aditama, Bandung.
- Santosa, Pandji, 2012. *Administrasi Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Sobirin, Achmad. 2009. *Budaya Organisasi. Edisi kedua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Sutrisno. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafarudin, 2010. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Syaud dan Makmun, 2010. *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suharso, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2010. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta
- Thoha, Miftah, 2010. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, CAPS, Yogyakarta.

II. Jurnal dan Penelitian

- Ananda, Trisha Rafika, dkk. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung*, FKIP Unila.
- Hayati, Tifa Mufida Fitriyatul. 2017. *Pengaruh Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Anggaran di MTSN 21 Jakarta*, UIN Syaif Hidayatullah, Jakarta
- Ibrahim, Fajrul Iman, 2010. *Teori Pengambilan Keputusan : Analisis Keputusan*. Makasar: Fekon UNHAS, (on line), tersedia: <http://www.scribd.com/doc/13564315/>
- Juemi. 2013. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Palu*, Jurnal Academica Untad, Volume 5 Nomor 01
- Romdhona, 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Organisasi Sekolah Dasar Negeri Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Sekolah*, Program Pascasarjana Universitas Garut.
- Ramdhani, Muhamad Ali, 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Universitas Garut
- Suhartini, Heni, 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Terhadap Manajemen Sekolah dalam Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Dana Sekolah*, Program Pascasarjana Universitas Garut.

III. Dokumen-Dokumen

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

Laporan Kinerja Guru SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah-Garut (2018)

Rencana Kerja SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah-Garut (2018)